



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syariful Rachman, S.E., M.M
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Natalia Trisnawati, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Apabila target kinerja tersebut tidak tercapai maka pihak pertama bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Perangkat Daerah,

Natalia Trisnawati, S.Pi, M.Si
Pembina Tingkat I (IV b)
NIP. 19761225 200502 2 002

Bontang, 29 April 2026

Sekretaris,

Syariful Rachman, S.E., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19770924 200112 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sekretariat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan Pajak Daerah (Penanggung Jawab)	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100 %
		Terlaksananya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100 %
2	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan Retribusi Daerah (Penanggung Jawab)	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 %
3	Terkelolanya Peningkatan Kualitas Layanan Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	100 %
		Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	100 %
		Terkelolanya Peningkatan Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah	100 %
4	Tercapainya Pengelolaan Anggaran Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPK)	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah	100 %
5	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Pada Badan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penetapan APBD Pemerintah Kota Bontang	100 %
		Tersedianya Pemenuhan Data Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	100 %
6	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah	100 %
		Tersedianya Laporan Perencanaan Dan Penganggaran pada Badan Pendapatan Daerah	100%
7	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah	100 %

Bontang, 29 April 2026

Kepala Perangkat Daerah,



Natalia Trisnawati. S.Pi, M.Si
Pembina Tingkat I (IV b)
NIP. 19761225 200502 2 002

Sekretaris,



Syariful Rachman, S.E., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19770924 200112 1 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

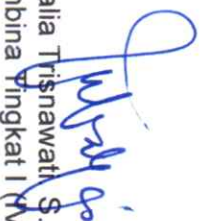
1. Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
3. Fungsi :
 1. Perencanaan operasional di lingkungan Sekretariat Bapenda.
 2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
 3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
 4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Bapenda.
 5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan perintah atasan.

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Sasaran Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan Pajak Daerah (Penanggung Jawab)	<p>Persentase Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</p> <p>Persentase Pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah</p>	$\frac{\sum (\text{Perencanaan Pajak Daerah yang ditetapkan})}{\sum (\text{Perencanaan Pajak Daerah yang direncanakan})} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">Indeks ETPD dalam Satu Tahun</p>	Laporan Target Pajak Daerah Laporan ETPD
2	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan Retribusi Daerah (Penanggung Jawab)	Persentase Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	$\frac{\sum (\text{Peencanaan Retribusi Daerah yang ditetapkan})}{\sum (\text{Perencanaan Retribusi Daerah yang direncanakan})} \times 100\%$	Laporan Target Retribusi Daerah
3	Terkelolanya Peningkatan Kualitas Layanan Dan Akuntabilitas	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	$\frac{\sum (\text{Pengadaan BMD yang dilaksanakan})}{\sum (\text{Pengadaan BMD yang direncanakan})} \times 100\%$	Rekapitulasi Pengadaan Barang Milik Daerah

Kinerja Perangkat Daerah	<p>Persentase Pengelolaan Kearsipan pada Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>Nilai Audit Pengelolaan Kearsipan pada Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>Nilai Hasil Audit Kearsipan Internal</p>
	<p>Persentase Tata Kelola Peningkatan Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>Nilai IKM Bapenda per semester</p>	<p>Hasil Nilai SKM</p>
4 Tercapainya Pengelolaan Anggaran Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPK)	<p>Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah</p>	$\frac{\sum (\text{Administrasi Keuangan dan Fisik yang dilaksanakan})}{\sum (\text{Administrasi Keuangan dan Fisik yang direncanakan})} \times 100\%$	<p>Data E-Smart dan Data SIPD</p>
	<p>Persentase Capaian Pelaksanaan Penetapan APBD Kota Bontang</p>	$\frac{\sum (\text{Penetapan APBD Kota Bontang})}{\sum (\text{Rancangan APBD Kota Bontang})} \times 100\%$	<p>Hasil Penetapan Perda APBD Kota Bontang</p>
5 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Pada Badan Pendapatan Daerah	<p>Persentase Pemenuhan Data Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</p>	<p>Pemenuhan data Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah khusus pendapatan asli daerah dalam satu tahun</p>	<p>Data Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</p>
	<p>Persentase Pelaksanaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>Ukuran keberhasilan capaian peningkatan Nilai SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>Data E-Smart</p>
6 Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p>Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran pada Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pada Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya</p>	<p>Data SIPD dan Data E-Smart</p>

<p>7</p> <p>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah</p>	$\frac{\Sigma \text{(laporan penilaian kinerja pegawai)}}{\text{(jumlah pegawai)}} \times 100\%$	<p>Rekapitulasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian</p>
---	---	--	---

Kepala Perangkat Daerah,



Natalia Trisnawati, S.Pi, M.Si
 Pembina Tingkat I (W/b)
 NIP. 19761225 200502 2 002

Bontang, 29 April 2026



Syariful Rachman, S.E., M.M
 Pembina (I/a)
 NIP. 19770924 200112 1 007



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wa Ode Ervinna, SST.Mar., M.E
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syariful Rachman, S.E., M.M
Jabatan : Sekretaris


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

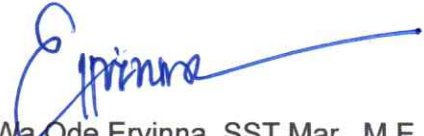
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Apabila target kinerja tersebut tidak tercapai maka pihak pertama bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,


Syariful Rachman, S.E., M.M
Pembina (V/a)
NIP. 19770924 200112 1 007

Bontang, 29 April 2026
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,


Wa Ode Ervinna, SST.Mar., M.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810410 200502 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sekretariat

No.	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan evaluasi proses bisnis, SOP, standar pelayanan. (Koordinator)	100 %
		Tersedianya pengelolaan kearsipan Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	100 %
		Tersedianya pengelolaan kearsipan digital dan Non digital Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	100 %
		Tersedianya Laporan SKM Badan Pendapatan Daerah	100 %
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Koordinator)	100 %
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CS, PW, SDA)	100 %
		Tersedianya penata usahaan pengelolaan aset dan barang milik daerah	100 %
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
3.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah (PPTK)	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pada Sekretariat	100 %
4.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Pada Badan Pendapatan Daerah	100 %

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1,369,520	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 684,760	APBD


3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	1,369,520	APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	1,369,520	APBD
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	15,374,408,641	APBD
6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	60,000,000	APBD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	684,760	APBD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	684,760	APBD
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	49,000,000	APBD
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3,585,120	APBD
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	302,908,540	APBD
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	13,024,594	APBD
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	6,619,395	APBD
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	242,658,000	APBD
15. Pengadaan Mebel	Rp	7,474,000	APBD
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5,000,000	APBD
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	360,000,000	APBD
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1,928,013,180	APBD
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	265,594,000	APBD
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	45,870,000	APBD
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	2,600,000	APBD

Sekretaris,

Syariful Rachman, S.E., M.M
Pembina (W/a)
NIP. 19770924 200112 1 007

Bontang, 29 April 2026

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,



Wa Ode Ervinna, SST.Mar., M.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810410 200502 2 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKRETARIAT


1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Tugas : Melaksanakan Unsur Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi
3. Fungsi :
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Bapenda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
 - f. Melaksanakan administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib administrasi;
 - g. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan internal di lingkungan Bapenda sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan pengelolaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Bapenda sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokol internal Bapenda sesuai dengan prosedur dalam rangka memberikan informasi terkait program dan kegiatan Bapenda;
 - k. Mengoordinir penyelenggaraan organisasi dan ketatalaksanaan internal Bapenda sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. Mengelola manajemen kepegawaian internal di lingkungan Bapenda sesuai dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian;
 - m. Mengoordinir penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
 - n. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja;

- o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

No.	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis, SOP, Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	Capaian pelaksanaan kegiatan penyusunan dan evaluasi proses bisnis, SOP, dan standar pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah	Rekapitulasi Proses Bisnis, SOP, dan Standar Pelayanan
		Persentase Pengelolaan Arsip pada Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	Capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen arsip pada Badan Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi Kearsipan
		Persentase Pengelolaan Kearsipan Digital dan Non Digital pada Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	Capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan digital dan non digital pada Badan Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi Kearsipan
		Persentase Pelaksanaan SKM Badan Pendapatan Daerah	Nilai IKM Bapenda per semester	Hasil Nilai SKM
		Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor pada Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	$\frac{\sum (\text{Penyediaan Komponen Kelistrikan yang dilaksanakan})}{\sum (\text{Penyediaan Komponen Kelistrikan yang direncanakan})} \times 100\%$	DPA dan SPJ
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Badan Pendapatan Daerah (Koordinator)	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Badan Pendapatan Daerah	$\frac{\sum (\text{Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan yang dilaksanakan})}{\sum (\text{Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan yang direncanakan})} \times 100\%$	DPA dan SPJ
		Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Badan Pendapatan Daerah	$\frac{\sum (\text{Penyediaan Bahan Logistik yang dilaksanakan})}{\sum (\text{Penyediaan Bahan Logistik yang direncanakan})} \times 100\%$	DPA dan SPJ
		Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Badan Pendapatan Daerah	$\frac{\sum (\text{Penyediaan Barang Cetakan yang dilaksanakan})}{\sum (\text{Penyediaan Barang Cetakan yang direncanakan})} \times 100\%$	DPA dan SPJ
		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	$\frac{\sum (\text{Penyediaan BMD yang dilaksanakan})}{\sum (\text{Penyediaan BMD yang direncanakan})} \times 100\%$	DPA dan SPJ

		<p>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Persentase Penatausahaan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah</p>	$\frac{\Sigma (\text{Penyediaan Jasa Penunjang yang dilaksanakan})}{\Sigma (\text{Penyediaan Jasa Penunjang yang direncanakan})} \times 100\%$ $\frac{\Sigma (\text{Penatausahaan Aset yang dilaksanakan})}{\Sigma (\text{Penatausahaan Aset yang direncanakan})} \times 100\%$ $\frac{\Sigma (\text{Pemeliharaan Barang yang dilaksanakan})}{\Sigma (\text{Pemeliharaan Barang yang direncanakan})} \times 100\%$	<p>DPA dan SPJ</p> <p>DPA dan SPJ</p> <p>DPA dan SPJ</p>
3.	<p>Tercapainya Pengelolaan Anggaran Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPTK)</p>	<p>Persentase Pelaksanaan Kegiatan pada Bagian Sekretariat</p>	$\frac{\Sigma (\text{Realisasi pelaksanaan kegiatan})}{\Sigma (\text{Rencana pelaksanaan kegiatan})} \times 100\%$	<p>Anggaran Kas dan LRA</p>
4.	<p>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah (Kordinator)</p>	<p>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah</p>	$\frac{\Sigma (\text{Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan})}{\Sigma (\text{Administrasi Kepegawaian yang direncanakan})} \times 100\%$	<p>Rekapitulasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian</p>

Sekretaris,


 Syariful Radhman, S.E., M.M
 Pembina (Wa)
 NIP. 19770924 200112 1 007

Bontang, 29 April 2026
 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,


 Wg Ode Ervinna, SST.Mar., M.E
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19810410 200502 2 007



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kwee Cahya Faisal, SE
Jabatan : Kepala Subbid Pengendalian Pendapatan Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Apabila target kinerja tersebut tidak tercapai maka pihak pertama bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, 29 April 2026

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah

Kepala Subbid Pengendalian Pendapatan Daerah

H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19750912 200012 1 003

Kwee Cahya Faisal, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP.19850718 201001 1 006

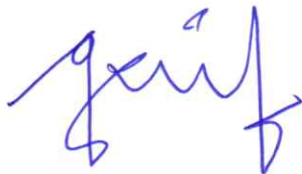
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB BIDANG PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya peningkatan penerimaan pajak daerah	Terlaksananya validasi pengendalian pendapatan daerah terkait pajak daerah	100%
		Terlaksananya urusan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah	100%
		Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	100%
		Terlaksananya penagihan pajak daerah	100%
2.	Terselenggaranya peningkatan penerimaan PAD selain pajak daerah	Terlaksananya validasi pengendalian pendapatan daerah terkait retribusi daerah	100%
		Terlaksananya koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi dalam hal retribusi daerah, kontribusi bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%
3.	Terselenggaranya peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan evaluasi proses bisnis, SOP, pada bidang PEPD. (Anggota)	100%
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Manajemen Resiko pada Bidang PEPD	100%
		Tersedianya pengelolaan kearsipan digital dan Non digital pada Bidang PEPD	100%

Bontang, 29 April 2026

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah

Kepala Subbid Pengendalian Pendapatan Daerah



H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19750912 200012 1 003



Kwee Cahya Faisal, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP.19850718 201001 1 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SUB BIDANG PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH

1. Jabatan : Kepala Subbid Pengendalian Pendapatan Daerah
2. Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang Urusan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
 2. Pelaksanaan tugas dukung teknis fungsi penunjang Urusan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
 3. Pemantauan, Pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukung teknis penunjang Urusan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
 5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsi Bapenda

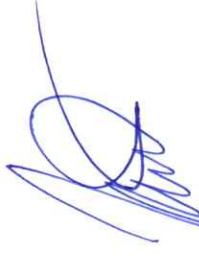
No. (1)	Sasaran Aktivitas (2)	Indikator Kinerja (3)	Penjelasan / Formulasi Penghitungan (4)	Sumber Data (5)
1	Terselenggaranya peningkatan penerimaan pajak daerah	<p>Persentase pelaksanaan validasi pengendalian pendapatan daerah terkait pajak daerah</p> <p>Persentase ketersediaan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah</p> <p>Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah</p>	<p>$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Pengendalian Pajak Daerah dalam 1 Tahun}}{\text{Target Pelaksanaan Pengendalian Pajak Daerah dalam 1 Tahun}} \times 100\%$</p> <p><i>Ketersediaan Realisasi Penerimaan = Pemenuhan Laporan Realisasi Pajak Daerah tiap bulannya</i></p> <p><i>Ketersediaan Laporan Piutang Pajak Daerah = Pemenuhan Laporan Realisasi Piutang Pajak Daerah tiap tahun</i></p> <p>$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Pemeriksaan}}{\text{Target Pelaksanaan Pemeriksaan}} \times 100\%$</p>	<p>Laporan Hasil Pengendalian Pajak Daerah</p> <p>Laporan Realisasi Pendapatan Pajak</p> <p>Laporan Piutang Pajak Daerah</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan</p>

No.	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Persentase Capaian Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</p>	$\frac{\text{Realisasi Penagihan Pajak Daerah}}{\text{Target Penagihan Pajak Daerah}} \times 100\%$	Laporan Hasil Penagihan Pajak Daerah
		<p>Persentase pelaksanaan validasi pengendalian pendapatan daerah terkait Retribusi Daerah</p>	$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Pengendalian Retribusi Daerah dalam 1 Tahun}}{\text{Target Pelaksanaan Pengendalian Retribusi Daerah dalam 1 Tahun}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pengendalian Retribusi Daerah
2	Terselenggaranya peningkatan penerimaan PAD selain pajak daerah	<p>Persentase Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi dalam hal Retribusi Daerah, Kontribusi bagian laba BUMD dan Penerimaan lain-lain PAD yang sah</p>	<p>Ukuran keberhasilan yang di capai oleh bidang pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait retribusi, kontribusi bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain PAD yang sah</p>	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
3	Terselenggaranya peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<p>Persentase pelaksanaan kegiatan penyusunan dan evaluasi proses bisnis, SOP, pada bidang PEPD. (Anggota)</p> <p>Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Resiko (MR) pada Bidang PEPD</p>	<p>Capaian pelaksanaan kegiatan penyusunan dan evaluasi proses bisnis, SOP, dan standar pelayanan pada Bidang PEPD</p> <p>Capaian Pemenuhan Dokumen Pendukung (evidence) Manajemen Resiko pada Bidang PEPD</p>	<p>Rekapitulasi Proses Bisnis, SOP, dan Standar Pelayanan</p> <p>Dokumen MR</p>

No. (1)	Sasaran Aktivitas (2)	Indikator Kinerja (3)	Penjelasan / Formulasi Penghitungan (4)	Sumber Data (5)
		Persentase pengelolaan kearsipan digital dan Non digital Bidang PEPD (Anggota)	Capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan digital dan non digital pada Bidang PEPD	Hasil Evaluasi Kearsipan

Bontang, 29 April 2026

Kepala Subbid Pengendalian Pendapatan Daerah



Kwee Cahya Faisal, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP.19850718 201001 1 006

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah



H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19750912 200012 1 003



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. Rini Wahyuni, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrudin, SE, M.A,M.Eng
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Syahrudin, SE, M.A,M.Eng
NIP 197402102005021001

PIHAK PERTAMA

Dra. Hj. Rini Wahyuni., M.Si
NIP 196910072001122004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase pengembangan potensi pendapatan daerah	%	100
		Persentase perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah	%	100

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Rp. 119.336.429
2. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Rp. 486.474.640
3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Rp. 699.996.711
4. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Rp. 177.655.800
5. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Rp. 128.598.316
Jumlah	Rp. 1.612.061.896

PIHAK KEDUA



Syahrudin, SE, M.A., M.Eng
NIP 197402102005021001

Bontang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA



Dra. Hj. Rini Wahyuni., M.Si
NIP 196910072001122004



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yonny Eka Susanty, S.Sos, M.A.P

Jabatan : Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. Rini Wahyuni, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Dra. Hj. Rini Wahyuni., M.Si
NIP 196910072001122004

PIHAK PERTAMA

Yonny Eka Susanty, S.Sos, M.A.P
NIP 198003142005022005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Perencanaan dan pelaporan sistem informasi pendapatan daerah	Jumlah laporan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA



Dra. Hj. Rini Wahyuni., M.Si
NIP 196910072001122004

PIHAK PERTAMA



Yonny Eka Susanty, S.Sos, M.A.P
NIP 198003142005022005



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendry Arnaldy Langsa, SS
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. Rini Wahyuni, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Dra. Hj. Rini Wahyuni., M.Si
NIP 196910072001122004

PIHAK PERTAMA

Hendry Arnaldy Langsa, SS
NIP 197702202009011005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan pengembangan pajak daerah serta pengusulan kebijakan pajak daerah.	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4
		Jumlah Laporan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan	1

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA



Dra. Hj. Rini Wahyuni., M.Si
NIP 196910072001122004

PIHAK PERTAMA



Hendry Arnaldy Langsa, SS
NIP 197702202009011005



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husain, SH
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syapriansyah, S.Hut
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA


Syapriansyah, S.Hut
NIP 197204042001121003


PIHAK PERTAMA


Husain, SH
NIP 197605272008011011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Persentase Pengelolaan, pendaftaran, penetapan, pendapatan, dan penilaian pajak Daerah.	Jumlah pendataan potensi pendapatan asli Daerah, validasi data wajib pajak.	Data	3.000
2.	Meningkatnya capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	84

PIHAK KEDUA


Syapriansyah, S.Hut
NIP 197204042001121003

Bontang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA


Husain, SH
NIP 197605272008011011



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrudin, SE, M.A,M.Eng
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Syahrudin, SE, M.A,M.Eng
NIP 197402102005021001

PIHAK PERTAMA

H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
NIP 197509122000121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah.	Laporan	24

KEGIATAN

1. Penagihan pajak daerah
2. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah

Jumlah

ANGGARAN

Rp. 372.596.040

Rp. 237.891.092

Rp. 610.487.132

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng
NIP 197402102005021001

PIHAK PERTAMA



H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
NIP 197509122000121003



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suparyanto, SH
Jabatan : Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
NIP 197509122000121003

PIHAK PERTAMA

Suparyanto, SH
NIP. 197502172001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah.	Jumlah laporan evaluasi pelayanan pajak Daerah.	Laporan	12
		Jumlah laporan evaluasi penerimaan pendapatan pajak daerah	Laporan	12

PIHAK KEDUA



H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
NIP 197509122000121003

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



Suparyanto, SH
NIP 197502172001121003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sekretaris
2. Tugas : memimpin dan menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
3. Fungsi :
 1. perencanaan program kerja Sekretariat;
 2. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 3. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 4. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Administrasi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	$\frac{\text{Laporan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Laporan}} \times 100\%$	Rencana Strategis, Rencana Kerja
		Jumlah laporan capaian kinerja	$\frac{\text{Jumlah laporan yang disusun}}{\text{Laporan}} \times 100\%$	SAKIP, LKPJ, LPPD
		Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Total laporan keuangan}} \times 100\%$	E-Smart
	Perentase kesekretariatan yang terpenuhi sesuai kebutuhan layanan	$\frac{\text{Jumlah layanan kesekretariatan}}{\text{Total Kepegawaian}} \times 100\%$	Dokumen Umum dan Kepegawaian (Data Pegawai, Laporan SKM, Laporan Barang persediaan dll)	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain
2. Tugas : melaksanakan urusan umum dan kepegawain sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
3. Fungsi :
 1. perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan
 2. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 3. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal kantor;
 4. pelaksanaan urusan kepegawain internal kantor;
 5. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
 6. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
 7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawain;
 8. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawain.

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelayanan dan administrasi	$\frac{\text{Jumlah administrasi ASN yang telah ditetapkan}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Bagian umum
		Persentase kelancaran layanan administrasi perkantoran	$\frac{\text{Kegiatan layanan administrasi yang terlaksana}}{\text{Kegiatan layanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$	Bagian umum
		Persentase sarana dan prasarana aparatur	$\frac{\text{Sarpas dengan kondisi baik}}{\text{Sarpas}} \times 100\%$	Bagian umum
		Persentase penunjang sarana dan prasarana	$\frac{\text{Jumlah penunjang sarpras}}{\text{Jumlah sarpras}} \times 100\%$	Bagian umum
	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana		$\frac{\text{Jumlah pemeliharaan sarpras}}{\text{Jumlah sarpras}} \times 100\%$	Bagian umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
2. Tugas : menyelenggarakan urusan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
3. Fungsi :
 1. perencanaan operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 2. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 3. penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
 4. penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah; dan
 5. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase pengembangan potensi pendapatan daerah	Jumlah laporan PAD Jumlah keseluruhan pendapatan	Laporan PAD
		Persentase perencanaan dan pelaporan sistem informasi pendapatan daerah	Jumlah laporan PAD Jumlah keseluruhan pendapatan	Laporan PAD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Subbid Sistem Informasi Pendapatan Daerah
2. Tugas : melaksanakan urusan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, dan akurat.
3. Fungsi :
 1. perencanaan kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 2. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 3. pelaksanaan urusan pembukuan dan pengendalian operasional;
 4. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Perencanaan dan pelaporan sistem informasi pendapatan daerah	Jumlah laporan elektronik transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah laporan penerimaan piutang dan pajak}}{\text{Jumlah pendapatan}} \times 100\%$ Jumlah bahan laporan kegiatan	Laporan penerimaan PAD DPA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **Jabatan :** Kepala Subbid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
2. **Tugas :** melaksanakan urusan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
3. **Fungsi :**
 1. perencanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah ;
 2. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 3. pelaksanaan urusan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah ;
 4. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah ; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah .

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan pengembangan pajak daerah serta pengusunan kebijakan pajak daerah.	Jumlah bahan penyusunan dokumen per objek pajak	Realisasi Objek Pajak
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah bahan kegiatan dokumen kebijakan pajak	DPA
		Jumlah Laporan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah bahan laporan kegiatan TP2DD	ETPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **Jabatan :** Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. **Tugas :** melaksanakan urusan pendataan dan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
3. **Fungsi :**
 1. perencanaan program kerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 2. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 3. penyelenggaraan urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 4. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase pendaftaran, pendapatan, dan penilaian pajak Daerah.	<p style="text-align: center;">Target objek pajak</p> <p style="text-align: center;">Realisasi Pendapatan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	Laporan realisasi pendapatan pajak daerah
2.	Meningkatnya indeks masyarakat (IKM)	Persentase Capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Capaian SKM	SKM Tingkat Kota

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **Jabatan :** Kepala Subbid Pendapatan
2. **Tugas :** melaksanakan urusan pendapatan wajib pajak, objek pajak, dan potensi pendapatan asli Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
3. **Fungsi :**
 1. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan;
 2. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 3. pelaksanaan urusan Pendapatan;
 4. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pendapatan.

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Persentase Pengelolaan, penetapan, pendapatan, dan penilaian pajak Daerah.	Jumlah pendapatan asli Daerah, validasi data wajib pajak.	Jumlah laporan pendapatan potensi pendapatan asli Daerah.	Laporan realisasi pendapatan pajak daerah
	Meningkatnya indeks masyarakat (IKM)	Persentase Capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Capaian SKM	SKM tingkat kota

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Subbid Pelayanan
2. Tugas : melaksanakan urusan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.
3. Fungsi :
 1. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pelayanan;
 2. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 3. pelaksanaan urusan Pelayanan;
 4. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelayanan; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pelayanan

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Persentase Pengelolaan, pendaftaran, dan penilaian pajak Daerah;	Jumlah pelayanan pendaftaran, penetapan, dan penilaian pajak Daerah;	Bahan Laporan Pelayanan Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah
	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Persentase Capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Capaian SKM	Nilai SKM Kota

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **Jabatan** : Kepala Bidang Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
2. **Tugas** : Melaksanakan penyusunan rencana, merumuskan, menyelenggarakan, pemeriksaan, penagihan, pemantauan, dan laporan Bidang Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
3. **Fungsi** :
 1. Merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah
 2. Merumuskan kebijakan pengendalian & evaluasi instensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
 3. Melaksanakan pemantauan dan sinkronisasi regulasi terkait pendapatan daerah
 4. Melaksanakan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah
 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENEJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laporan pengendalian dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah.	<p>Penjelasan serta formulasi perhitungannya:</p> <p>1) Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Penerimaan: Menggunakan rasio realisasi terhadap target. • Audit dan Pemeriksaan Pajak/Retribusi: Memeriksa kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. • Penegakan Hukum dan Sanksi: Melakukan tindakan terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian pembayaran. • Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi. <p>a) Formulasi Perhitungan Pajak Daerah</p> $\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 1 Tahun 2022 • PP No. 35 Tahun 2023 • PMK No. 157/PMK.04/2017 • PMK No. 85 Tahun 2024 • PMK No. 07 Tahun 2025 • Perwali No. 32 Tahun 2024 • Aplikasi SISMIOP • Aplikasi SIMPTDA

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>PENJELASAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif = Persentase pajak sesuai peraturan daerah. • Dasar Pengenaan Pajak = Nilai transaksi atau objek pajak. <p>b) Formulasi Perhitungan Retribusi Daerah</p> $Retribusi = Tarif Retribusi \times Jumlah Penggunaan Jasa$ <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif Retribusi = Biaya per unit layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. • Jumlah Penggunaan Jasa = Volume atau jumlah layanan yang digunakan oleh masyarakat <p>Penjelasan serta formulasi perhitungannya:</p> <p>2) Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.</p> <p>Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penerimaan pajak dan retribusi berjalan optimal. Indikator evaluasi meliputi:</p> <p>a) Rasio Realisasi terhadap Target :</p> $Rasio = \left(\frac{Realisasi Penerimaan}{Target Penerimaan} \right) \times 100\%$ <p>Jika rasio < 100%, berarti penerimaan belum mencapai target.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi E-BPHTB • Aplikasi Bapenda Etam • Laporan Subbidang <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 1 Tahun 2022 • PP No. 35 Tahun 2023 • PMK No. No. 157/PMK.04/2017 • PMK No. 85 Tahun 2024 • PMK No. 07 Tahun 2025 • Perwali No. 32 Tahun 2024 • Aplikasi SISMIOP

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		<p>b) Efektivitas Pemungutan Pajak/Retribusi</p> $\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Potensi Penerimaan}} \right) \times 100\%$ <p><i>Jika efektivitas < 100%, berarti ada kebocoran atau potensi pajak yang belum tergali</i></p> <p>c) Efisiensi Pemungutan</p> $\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Total Penerimaan}} \right) \times 100\%$ <p><i>Semakin rendah rasio, semakin efisien pemungutan.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIMPTDA • Aplikasi E-BPHTB • Aplikasi Bapenda Etam • Laporan Subbidang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana, pemantauan, validasi, pemeriksaan, penagihan, dan laporan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
3. Fungsi :
 1. Melakukan validasi pengendalian pendapatan daerah terkait pajak
 2. Melaksanakan urusan realisasi penerimaan dan piutang pajak Daerah
 3. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan penggunaan benda berharga
 4. Melaksanakan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah
 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian pendapatan daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja.

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
1. Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah.	Laporan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.	<p>Laporan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak serta efektivitas upaya penagihan pajak yang tertunggak.</p> <p>1) <i>Pemeriksaan Pajak Daerah</i></p> <p>Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar</p> <p>a) Jumlah Wajib Pajak yang Diperiksa</p> <p>Menghitung berapa banyak wajib pajak yang telah diperiksa dalam suatu periode</p> <p>Formula:</p> $\text{Jumlah WP diperiksa} = \sum (\text{WP yang dilakukan pemeriksaan})$	<ul style="list-style-type: none"> • SISMIOP & SIMPTDA • Laporan pemeriksaan & penagihan • SPT PBB, SPPD & SKPD • Laporan

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
		<p>Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika jumlah pemeriksaan tinggi, maka kepatuhan pajak dapat meningkat. • Jika jumlah pemeriksaan rendah, mungkin ada kendala dalam kapasitas pemeriksa pajak. <p>b) Temuan Ketidaksesuaian Pajak</p> <p>Menilai jumlah kasus wajib pajak yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak</p> <p>Formula:</p> $\text{Rasio Temuan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah WP yg melanggar}}{\text{Jumlah WP yg diperiksa}} \right) \times 100\%$ <p>Interpretasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika rasio tinggi, berarti banyak WP yang belum patuh. • Jika rasio rendah, berarti kepatuhan wajib pajak cukup baik. <p>c) Potensi Pajak Tambahan dari Pemeriksaan</p> <p>Menilai jumlah tambahan pajak yang seharusnya dibayar akibat pemeriksaan.</p> <p>Formula:</p> $\text{Potensi Pajak Tambahan} = \sum (\text{Koreksi Pajak WP yg diperiksa})$ <p>Digunakan untuk mengukur efektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.</p> <p>2) Penagihan Pajak Daerah</p> <p>Penagihan pajak daerah bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak yang memiliki tunggakan dapat melunasi kewajibannya.</p> <p>a. Total Tunggakan Pajak</p>	

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
		<p>Menghitung total jumlah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak</p> <p>Formula:</p> $\text{Total Tunggakan Pajak} = \sum (\text{Jumlah Pajak Yg Belum dibayar})$ <p>Digunakan untuk mengetahui seberapa besar piutang pajak yang belum tertagih.</p> <p>b. Persentase Penagihan Pajak Berhasil</p> <p>Menilai efektivitas proses penagihan pajak dengan membandingkan jumlah pajak yang berhasil ditagih dengan total tunggakan</p> <p>Formula:</p> $\text{Presentase Penagihan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Pajak Yg Nerhasil ditagih}}{\text{Total Tunggakan Pajak}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • $\geq 80\%$ → Penagihan efektif • $50\% - 79\%$ → Penagihan cukup efektif • $< 50\%$ → Penagihan kurang efektif <p>c. Rasio Surat Teguran dan Surat Paksa</p> <p>Mengukur seberapa banyak surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan terhadap jumlah wajib pajak yang menunggak.</p> <p>Formula:</p> $\text{Rasio Teguran (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Surat Teguran}}{\text{Jumlah WP yang Menunggak}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jika rasio tinggi, berarti upaya penagihan aktif dilakukan. • Jika rasio rendah, berarti masih banyak tunggakan yang belum diproses dengan tindakan hukum 	

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
	Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<p>d. Efisiensi Penagihan Pajak</p> <p>Mengukur perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk penagihan pajak dengan jumlah pajak yang berhasil ditagih</p> <p>Formula:</p> $\text{Efisiensi Penagihan}(\%) = \left(\frac{\text{Biaya Penagihan Pajak}}{\text{Total Pajak yg berhasil ditagih}} \right) \times 100\%$ <p>Semakin rendah angkanya, semakin efisien proses penagihan pajak</p> <p>1) Komponen dalam Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah:</p> <p>a) Pengendalian</p> <p>Pengendalian pajak daerah : untuk memastikan bahwa penerimaan pajak berjalan sesuai target, serta menekan tunggakan pajak yang terjadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Efektivitas Penerimaan Pajak Mengukur sejauh mana penerimaan pajak daerah mencapai target yang ditetapkan. <p>Formulasi Perhitungan Pengendalian Pajak Daerah:</p> $\text{Efektivitas} (\%) = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ❖ $\geq 100\%$ → Efektif ❖ $80\% - 99\%$ → Cukup efektif ❖ $< 80\%$ → Kurang efektif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menilai persentase wajib pajak yang memenuhi kewajibannya membayar pajak. 	

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
		<p>Formula:</p> $\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \left(\frac{\text{Jmlh WP Bayar Pajak}}{\text{Jmlh WP Terdaftar}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ❖ 90% → Kepatuhan tinggi ❖ 70% - 90% → Kepatuhan cukup baik ❖ < 70% → Kepatuhan rendah <p>❖ Rasio Tunggalan Pajak Mengukur jumlah pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak</p> <p>Formula:</p> $\text{Rasio Tunggalan Pajak (\%)} = \left(\frac{\text{Total Tunggalan Pajak}}{\text{Total Kewajiban Pajak}} \right) \times 100\%$ <p>Semakin kecil rasio ini, semakin baik pengendalian pajak.</p> <p>b) Pemeriksaan Pajak Daerah</p> <p>Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengidentifikasi pelanggaran wajib pajak dan memastikan kepatuhan dalam pelaporan pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Pemeriksaan Wajib Pajak <p>Mengukur jumlah wajib pajak yang telah diperiksa dibandingkan dengan total wajib pajak terdaftar</p> <p><i>Formulasi Perhitungan Pemeriksaan Pajak Daerah</i></p> $\text{Rasio Pemeriksaan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah WP Diperiksa}}{\text{Jumlah WP Terdaftar}} \right) \times 100\%$ <p>Jika rasio tinggi, berarti pemeriksaan pajak berjalan efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Temuan Ketidaksesuaian <p>Menilai seberapa banyak wajib pajak yang ditemukan</p>	

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
		<p>memiliki ketidaksesuaian dalam laporan pajak mereka</p> $\text{Rasio Temuan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah WP Diperiksa}}{\text{Jumlah WP Terdaftar}} \right) \times 100\%$ <p>Semakin tinggi angkanya, semakin banyak ketidaksesuaian yang ditemukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi Pajak Tambahan dari Pemeriksaan Menilai jumlah tambahan pajak yang seharusnya dibayarkan akibat pemeriksaan <p><i>Potensi Pajak Tambahan = \sum (Koreksi pajak dari WP yg diperiksa)</i></p> <p>Menggambarkan dampak positif pemeriksaan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.</p> <p>c) Pengawasan Pajak Daerah Pengawasan pajak daerah dilakukan untuk memastikan wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan menghindari tunggakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Efektivitas Penagihan Pajak Mengukur seberapa besar pajak tertunggak yang berhasil ditagih oleh pemerintah daerah. <p><i>Formulasi :</i></p> $\text{Efektivitas Penagihan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Pajak ditagihkan}}{\text{Total Tunggakan Pajak}} \right) \times 100\%$ <p>Jika > 80%, maka penagihan efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rasio Surat Teguran dan Surat Paksa Menilai seberapa aktif pemerintah daerah dalam menindaklanjuti wajib pajak yang menunggak. 	

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
		<p>Rasio Surat Teguran (%) = $\left(\frac{\text{Jumlah Surat Teguran}}{\text{Jumlah WP yg Menunggak}} \right) \times 100\%$</p> <p>Jika rasio tinggi, berarti pengawasan dilakukan dengan ketat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Efisiensi Pengawasan Pajak <p>Mengukur biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan pajak dibandingkan dengan total pajak yang berhasil diamankan.</p> <p><i>Efisiensi Pengawasan (%)</i></p> $= \left(\frac{\text{Biaya Pengawasan Pajak}}{\text{Total Pajak yg berhasil diamankan}} \right) \times 100\%$ <p>Semakin rendah nilai ini, semakin efisien pengawasan pajak.</p>	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana, evaluasi, pemantauan dan laporan Sub Bidang evaluasi Pendapatan Daerah
3. Fungsi :
 1. Merencanakan kegiatan Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah
 2. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
 3. Melaksanakan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 4. Melaksanakan evaluasi penerimaan pendapatan daerah secara periodik
 5. Melaksanakan pemantauan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
 6. Melaksanakan pemantauan pemungutan Daerah dan retribusi Daerah
 7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang evaluasi pendapatan daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah.	laporan evaluasi pelayanan pajak Daerah.	<p>A. Proses Laporan evaluasi pelayanan pajak daerah:</p> <p>untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak daerah. Formulasi perhitungan evaluasi, seperti:</p> <p>1. Efektivitas Pelayanan Pajak Daerah</p> <p>Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan.</p> $\text{Efektivitas (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jika hasilnya $\geq 100\%$, maka pelayanan sangat efektif. • Jika $80\% - 99\%$, maka pelayanan cukup efektif. • Jika $< 80\%$, maka pelayanan kurang efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • SISMIOP & SIMPTDA • Laporan pelayanan • SPPPT PBB, SPPD & SKPD

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
		<p>2. Efisiensi Pelayanan Pajak Daerah</p> <p>Efisiensi diukur dengan membandingkan biaya administrasi pemungutan pajak dengan penerimaan pajak yang diperoleh</p> $Efisiensi (\%) = \left(\frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak}{Total\ Penerimaan\ Pajak} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Semakin kecil persentasenya, semakin efisien pelayanannya. <p>3. Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan rasio antara jumlah wajib pajak yang membayar pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar</p> $Tingkat\ Kepatuhan(\%) = \left(\frac{Jumlah\ WP\ yg\ bayar\ Pajak}{Jumlah\ WP\ Terdaftar} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jika > 90%, kepatuhan tinggi. • Jika 70% - 90%, kepatuhan cukup baik. • Jika < 70%, kepatuhan rendah. <p>4. Kepuasan Wajib Pajak</p> <p>Kepuasan wajib pajak dapat diukur melalui survei menggunakan skala Likert (misalnya 1-5).</p> $IKP = \left(\frac{J\sum (Nilai\ Jawaban\ X\ Jumlah\ Responden)}{Total\ Responden\ X\ Skor\ Maksimum} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jika > 80%, kepuasan tinggi. • Jika 60% - 80%, kepuasan cukup baik. • Jika < 60%, perlu perbaikan <p>laporan evaluasi pelayanan pajak daerah dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah</p>	

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
	laporan evaluasi penerimaan pendapatan pajak daerah	<p>B. penerimaan pendapatan pajak daerah Laporan penerimaan pendapatan pajak daerah digunakan untuk mengukur pencapaian realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan daerah</p> <p>1) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Realisasi penerimaan pajak daerah adalah jumlah pendapatan pajak yang berhasil dikumpulkan dalam suatu periode (bulanan, triwulanan, atau tahunan). Realisasi Penerimaan Pajak = Σ(Penerimaan dari masing-masing jenis pajak)</p> <p>2) Persentase Capaian Target Pajak Mengukur sejauh mana realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. $\text{Capaian Target (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jika hasilnya $\geq 100\%$, berarti penerimaan pajak melebihi target. • Jika $80\% - 99\%$, berarti pencapaian cukup baik. • Jika $< 80\%$, maka perlu evaluasi lebih lanjut. <p>3) Pertumbuhan Penerimaan Pajak Mengukur kenaikan atau penurunan penerimaan pajak dibandingkan dengan periode sebelumnya. $\text{Pajak Pertumbuhan (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi thn ini} - \text{Realisasi tahun lalu}}{\text{Realisasi pajak tahun ini}} \right) \times 100\%$</p> </p>	<ul style="list-style-type: none"> • SISMIOP & SIMPATDA • Realisasi penerimaan • SPPTD, SPPD, SKPD & Surat Tagihan



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Maryati, S.STP., M.A.P
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Abdul Azis, S.E., M.A.P
Jabatan : Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011

Bontang, Januari 2025

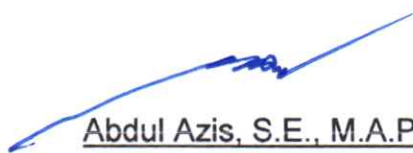
PIHAK PERTAMA


Sri Maryati, S.STP., M.A.P
Penata / III.c
NIP. 199205272014062001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pelayanan dan peningkatan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen	45
		Jumlah Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu.	Dokumen	45
		Jumlah penyusunan Daftar Kebutuhan ASN	Berkas	1
		Persentase penginputan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai	%	100
		Jumlah dokumen survei kepuasan masyarakat	Dokumen	1

PIHAK KEDUA


Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011

Bontang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA


Sri Maryati, S.STP., M.A.P
Penata / III.c
NIP. 199205272014062001



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulimah
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abdul Azis, S.E., M.A.P
Jabatan : Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

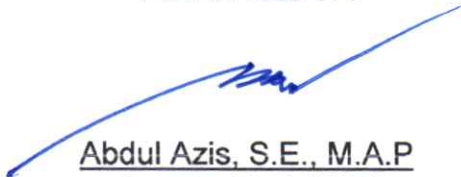
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011



Sulimah
Penata Muda / III.a
NIP. 198009042007012011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah (KIR, KIB, Buku inventaris)	Dokumen	3
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1
2.	persentase penunjang sarana dan prasarana	Terlaksananya Laporan BMD yang di susun	Laporan	6
3.	persentase pemeliharaan atas sarana dan prasarana	Terlaksananya dokumen usulan bahan RKBMD yang dihimpun	Dokumen	1
		Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	%	100
		Persentase pemeliharaan gedung kantor	%	100

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011



Sulimah
Penata Muda / III.a
NIP. 198009042007012011



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruslan, SE
Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

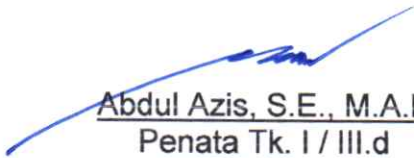
Nama : Abdul Azis, S.E., M.A.P
Jabatan : Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011

Bontang, Januari 2025


PIHAK PERTAMA


Ruslan, SE
Penata Muda / III.a
NIP. 197706252009011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Kelancaran Layanan Administrasi Perkantoran	Mengklasifikasikan untuk setiap dokumen dan memberikan indeks atau label yang jelas pada arsip	Dokumen	12
		Melakukan pemeliharaan dokumen agar tetap terjaga kualitasnya	Dokumen	12
		Membuat laporan berkala mengenai status arsip, termasuk volume dokumen baru.	Laporan	4

PIHAK KEDUA


Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011

Bontang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA


Ruslan, SE
Penata Muda / III.a
NIP. 197706252009011002



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bilhogen
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abdul Azis, S.E., M.A.P
Jabatan : Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

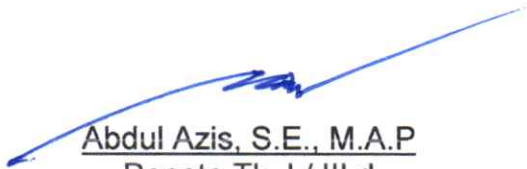

Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011


Bilhogen
Pengatur Tk. I / II.d
NIP. 197606042007011021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya pelayanan mal pelayanan publik	Surat	40


PIHAK KEDUA



Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011

Bontang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA



Bilhogen
Pengatur Tk.I/ II.d
NIP. 197606042007011021



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

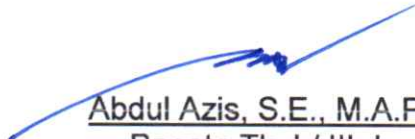
Nama : Abdul Azis, S.E., M.A.P
Jabatan : Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011

Bontang, Januari 2025

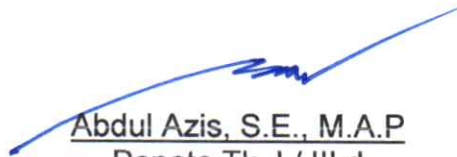
PIHAK PERTAMA


Edy
Pengatur Muda / II.a
NIP. 198304082010011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya pelayanan mal pelayanan publik	Surat	40

PIHAK KEDUA


Abdul Azis, S.E., M.A.P
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197205122002121011

Bontang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA


Edy
Pengatur Muda / II.a
NIP. 198304082010011001



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vany Prisca Sherliana Panggabean, S.STP
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197404112000031001


Vany Prisca Sherliana Panggabean, S.STP
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP. 199704102018082001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan keuangan	Meneliti berkas kelengkapan bukti pengeluaran, pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan perhitungan keuangan.	Berkas	300
		Menyusun Dokumen Manajemen Resiko	Dokumen	2
		Memverifikasi pengetikan dan penyusunan RKA, RKA-P, DPA, DPA-P (kegiatan perencanaan dan evaluasi)	Dokumen	4
		Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12

PIHAK KEDUA


Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197404112000031001

Bontang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA


Vany Prisca Sherliana Panggabean, S.STP
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP. 199704102018082001



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reni Risyanti, A.Md
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197404112000031001


Reni Risyanti, A.Md
Penata Muda / III.a
NIP. 198001302015032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Persentase dokumen administrasi keuangan	Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-LS yg tersedia	Dokumen	12
		Melaksanakan Transaksi pembayaran/pengeluaran (belanja) dan laporan penerimaan ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register SPPUP/GU/TU/LS	Dokumen	12
		Jumlah Bukti pembayaran atas tagihan/kuitansi dan permintaan uang muka	Dokumen	12
		Jumlah Dokumen register penutupan kas	Kegiatan	1
		Jumlah Berkas laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)	Berkas	12

	Jumlah berkas Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap bulannya	Berkas	12
	Melakukan pencatatan transaksi dalam sistem	Dokumen	500
	Melakukan pemotongan / pemungutan dan penyetoran pajak ke rekening kas daerah / Negara	Dokumen	12
	Membuat dokumen berita acara rekonsiliasi keuangan	Dokumen	12

PIHAK KEDUA


Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
 Pembina Tk. I / IV.b
 NIP. 197404112000031001

Bontang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA


Reni Risyanti, A.Md
 Penata Muda / III.a
 NIP. 198001302015032001



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karina Mirna Putri Marali, A.Md.M

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syaifullah, SH., M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197404112000031001



Karina Mirna Putri Marali, A.Md.M
Pengatur Tk. I / II.d
NIP. 199709032019032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Persentase dokumen administrasi keuangan	Membuat buku kas penerimaan pajak PBB, BPHTB, dan pajak daerah	Dokumen	12
		Menyusun laporan penerimaan pajak daerah bulanan dan semesteran	Laporan	12

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA


Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197404112000031001

PIHAK PERTAMA


Karina Mirna Putri Marali, A.Md.M
Pengatur Tk. I / II.d
NIP. 199709032019032001



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Siti Wulandari, A.Md.Kb.N

Jabatan : Pengolah Data Dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syaifullah, SH., M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197404112000031001


Dwi Siti Wulandari, A.Md.Kb.N
Pengatur / II.c
NIP. 200003202022012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

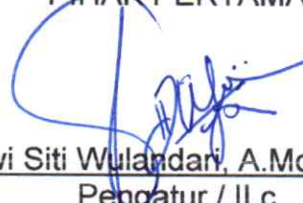
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penyampaian dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan keuangan	Melakukan pengumpulan data penyusunan dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja)	Dokumen	2
		Menyusun dokumen kelengkapan SAKIP, LKPJ, LPPD	Dokumen	3
		Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan	1
		Mengumpulkan data laporan keuangan dan prognosis perangkat daerah	Laporan	2
		Melakukan penyusunan dokumen anggaran (RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA-Perubahan)	Dokumen	4

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA


Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197404112000031001

PIHAK PERTAMA


Dwi Siti Wulandari, A.Md.Kb.N
Pengatur / II.c
NIP. 200003202022012003



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudy Setyawan
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Muhammad Syaifullah, SH., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197404112000031001


Rudy Setyawan
Penata Muda / III.a
NIP. 198007292006041012


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan	Membuat dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP UP, GU, TU dan LS)	Dokumen	150
		Jumlah draf Dokumen arsip Surat Permintaan Pembayaran yang lengkap	Dokumen	150
		Jumlah Dokumen Pengadaan	Dokumen	70

Bontang, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Muhammad Syaifulah, SH., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197404112000031001


Rudy Setyawan
Penata Muda / III.a
NIP. 198007292006041012

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
2. Tugas : Melaksanakan dukungan teknis dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, mengecek, menelaah dan membuat konsep hasil penelaahan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka penyiapan bahan kebijakan di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Fungsi :
 1. Mengumpulkan bahan dan dokumen Bidang tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengklasifikasikan bahan dan dokumen Bidang tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 3. Menelaah bahan dan dokumen Bidang tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 4. Menyusun rekomendasi Bidang tata usaha berdasarkan pemanafaatannya
 5. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi bagian tata usaha

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Pelayanan dan peningkatan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	ANJAB dan ABK
		Jumlah Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu.	Jumlah Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu.	PK dan IKI
		Jumlah penyusunan Daftar Kebutuhan ASN	Jumlah penyusunan Daftar Kebutuhan ASN	Bazetting dan Peta Jabatan
		Persentase penginputan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai	Persentase penginputan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai	KGB, Kenpa, SIM Gaji
	Jumlah dokumen survei kepuasan masyarakat		Jumlah dokumen penyusunan survei kepuasan masyarakat	SKM OPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service) yang meliputi dukungan administrasi dan kesekretariatan (pencatatan dan dokumentasian , antara lain administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, umum, tata usaha, dan unit teknis sesuai dengan tugas fungsi organisasi) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Fungsi :
 1. Menerima dan mencatat surat masuk, surat keluar, dokumen internal, dan berbagai jenis informasi lainnya;
 2. Mengatur dan menyimpan dokumen secara manual maupun digital;
 3. Mengakses dokumen secara manual maupun digital;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
 5. melaksanakan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Pengadministrasi

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah (KIR, KIB, Buku inventaris)	Jumlah Penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah (KIR, KIB, Buku inventaris)	KIR, KIB, Buku inventaris
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemindehtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen aset dan barang
			Jumlah Laporan BMD yang di susun	Dokumen aset dan barang
2.	persentase penunjang sarana dan prasarana	Terlaksananya Laporan BMD yang di susun	Jumlah dokumen usulan bahan RKBMD yang dihimpun	Dokumen aset dan barang
			Jumlah Laporan BMD yang di susun	RKBMD
3.	persentase pemeliharaan atas sarana dan prasarana	Terlaksananya dokumen usulan bahan RKBMD yang dihimpun	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dokumen Aset
			Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Dokumen pemeliharaan aset
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dokumen Aset

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penata Layanan Operasional
2. Tugas : Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis, mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahantagaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasi.
3. Fungsi :
 1. Melakukan persiapan suatu layanan teknis;
 2. Melaksanakan layanan teknis suatu Obyek kerja
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 4. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan baik lisan maupun tertulis.

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Kelancaran Layanan Administrasi Perkantoran	Mengklasifikasikan untuk setiap dokumen dan memberikan indeks atau label yang jelas pada arsip	Jumlah pengarsipan surat	Arsip surat
		Melakukan pemeliharaan dokumen agar tetap terjaga kualitasnya	Jumlah pemeliharaan dokumen atau pemeliharaan arsip	Arsip surat
		Membuat laporan berkala mengenai status arsip, termasuk volume dokumen baru.	Laporan arsip surat	Arsip surat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **Jabatan :** Pengadministrasi Perkantoran
2. **Tugas :** Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service) yang meliputi dukungan administrasi dan kesekretariatan (pencatatan dan dokumentasian , antara lain administrasi keuangan, kepegawalan, perencanaan, umum, tata usaha, dan unit teknis sesuai dengan tugas fungsi organisasi) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. **Fungsi :**
 1. Menerima dan mencatat surat masuk, surat keluar, dokumen internal, dan berbagai jenis informasi lainnya;
 2. Mengatur dan menyimpan dokumen secara manual maupun digital;
 3. Mengakses dokumen secara manual maupun digital;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
 5. melaksanakan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Pengadministrasi

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya pelayanan publik	pelayanan mal Jumlah pengunjung layanan MPP	Register pengunjung layanan MPP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service) yang meliputi dukungan administrasi dan kesekretariatan (pencatatan dan dokumentasian , antara lain administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, umum, tata usaha, dan unit teknis sesuai dengan tugas fungsi organisasi) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Fungsi :
 1. Menerima dan mencatat surat masuk, surat keluar, dokumen internal, dan berbagai jenis informasi lainnya;
 2. Mengatur dan menyimpan dokumen secara manual maupun digital;
 3. Mengakses dokumen secara manual maupun digital;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
 5. melaksanakan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Pengadministrasi

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENEJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya pelayanan publik	pelayanan mal Jumlah pengunjung layanan MPP	Register pengunjung layanan MPP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
2. Tugas : Melaksanakan dukungan teknis dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, mengecek, menelaah dan membuat konsep hasil penelaahan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka penyiapan bahan kebijakan di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Fungsi :
 1. Mengumpulkan bahan dan dokumen Bidang Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengklasifikasikan bahan dan dokumen Bidang Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 3. Menelaah bahan dan dokumen Bidang tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 4. Menyusun rekomendasi Bidang tata usaha berdasarkan pemantaatannya
 5. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi bagian tata usaha

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Persentase dokumen administrasi keuangan	Meneiti berkas kelengkapan bukti pengeluaran, pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan perhitungan keuangan.	berkas kelengkapan bukti pengeluaran, pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan perhitungan keuangan	pengajuan surat pertanggung jawaban (SPJ) UP, GU, TU, LS DPA / DPPA
		Menyusun dokumen manajemen resiko	Dokumen analisis manajemen resiko	Manajemen resiko
		Memverifikasi pengetikan dan penyusunan RKA, RKAP, DPA, DPAP (kegiatan perencanaan dan evaluasi)	Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPAP	RKA, RKAP, DPA, DPAP
	Membuat laporan jawaban keuangan	pertanggung	Laporan realisasi anggaran	SPJ

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
2. Tugas : Melaksanakan dukungan teknis dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, mengecek, menelaah dan membuat konsep hasil penelaahan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka penyiapan bahan kebijakan di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Fungsi :
 1. Mengumpulkan bahan dan dokumen Bidang Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengklasifikasikan bahan dan dokumen Bidang Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 3. Menelaah bahan dan dokumen Bidang tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 4. Menyusun rekomendasi Bidang tata usaha berdasarkan pemanafaatannya
 5. melaksanakan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi bagian tata usaha

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Persentase dokumen administrasi keuangan	Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GUTU dan SPP-LS yg tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah bahan SPJ pembayaran</p> <p style="text-align: center;">x 100%</p>	SPJ
		Melaksanakan pembayaran/pengeluaran (belanja) dan laporan penerimaan ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register SPPUP/GUTULS	<p style="text-align: center;">Jumlah laporan pembayaran perbulan</p> <p style="text-align: center;">x 100%</p>	BPKAD
		Jumlah Bukti pembayaran atas tagihan/kuitansi dan permintaan uang muka	<p style="text-align: center;">Jumlah Bahan SPJ</p>	SPJ
		Jumlah Dokumen register penutupan kas	<p style="text-align: center;">Jumlah Bahan SPJ</p>	SPJ
		Jumlah Berkas laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)	<p style="text-align: center;">Jumlah Bahan SPJ</p>	SPJ

Jumlah berkas Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap bulannya	Berita acara pemeriksaan kas	Efinance
Melakukan pencatatan transaksi dalam sistem	Jumlah dokumen BKU	SPJ
Melakukan pemotongan / pemungutan dan penyetoran pajak ke rekening kas daerah / Negara	Jumlah E-Billing	DJP Online
Membuat dokumen berita acara rekonsiliasi keuangan	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan	Efinance

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
2. Tugas : Melaksanakan dukungan teknis dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, mengecek, menelaah dan membuat konsep hasil penelaahan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka penyiapan bahan kebijakan di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Fungsi :
 1. Mengumpulkan bahan dan dokumen Bidang Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengklasifikasikan bahan dan dokumen Bidang Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 3. Menelaah bahan dan dokumen Bidang tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 4. Menyusun rekomendasi Bidang tata usaha berdasarkan pemanafaatannya
 5. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi bagian tata usaha

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Persentase dokumen administrasi keuangan	Membuat buku kas penerimaan pajak PBB, BPHTB, dan pajak daerah	Jumlah kas penerimaan pajak PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah	Laporan realisasi PBB dan BPHTB
		Menyusun laporan penerimaan pajak daerah bulanan dan semesteran	Laporan penerimaan	PAD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **Jabatan :** Pengolah Data Dan Informasi
2. **Tugas :** Melaksanakan pengelolaan, verifikasi dan penyusunan terhadap data, dan laporan lingkungan unit organisasi.
3. **Fungsi :**
 1. Mengelola data dengan pecoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
 2. Memverifikasi data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
 3. Menganalisis Obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
 4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis Obyek kerja
 5. Mencatat perkembangan dan permasalahan Obyek kerja
 6. Mengolah dan menyajikan Obyek kerja dalam bentuk yang telah ditetapkan

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Penyampaian dokumen perencanaan, laporan kinerja dan capaian keuangan	Melakukan pengumpulan data penyusunan dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja) Menyusun dokumen kelengkapan SAKIP, LKPJ, LPPD Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Data penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Data penyusunan SAKIP, LKPJ, LPPD Data LKIP	Rencana Strategis, Rencana Kerja SAKIP, LKPJ, LPPD LKIP
		Mengumpulkan data laporan keuangan dan prognosis perangkat daerah	Data laporan keuangan dan prognosis OPD	SPJ
		Melakukan penyusunan dokumen anggaran (RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA-Perubahan)	Data penyusunan RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA-Perubahan	RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA-Perubahan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **Jabatan :** Pengadministrasi Perkantoran
2. **Tugas :** Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service) yang meliputi dukungan administrasi dan kesekretariatan (pencatatan dan dokumentasian , antara lain administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, umum, tata usaha, dan unit teknis sesuai dengan tugas fungsi organisasi) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. **Fungsi :**
 1. Menerima dan mencatat surat masuk, surat keluar, dokumen internal, dan berbagai jenis informasi lainnya
 2. Mengatur dan menyimpan dokumen secara manual maupun digital
 3. Mengakses dokumen secara manual maupun digital untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
 5. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan baik lisan maupun tertulis

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan	Membuat dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP UP, GU, TU dan LS)	Jumlah bahan SPJ	SPJ
		Jumlah draf Dokumen arsip Surat Permintaan Pembayaran yang lengkap	Jumlah draf Dokumen arsip Surat Permintaan Pembayaran	SPJ
		Jumlah Dokumen Pengadaan	Jumlah surat pesanan	Dokumen pengadaan Sekretariat dan Bidang



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astika Tiara Hakim, A.Md.A.Pj
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendry Arnaldy Langsa, SS
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Hendry Arnaldy Langsa, SS
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197702202009011005

Pihak Pertama,

Astika Tiara Hakim, A.Md. A.Pj
Pengatur (II/c)
NIP. 199903272022012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Laporan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah dan pengembangan pajak daerah serta pengusulan kebijakan pajak daerah.	Dokumen	1
		Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2

Bontang, Januari 2025

Pihak Kedua,



Hendry Arnaldy Langsa, SS
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197702202009011005

Pihak Pertama,



Astika Tiara Hakim, A.Md. A.Pi
Pengatur (II/c)
NIP. 199903272022012001



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Eka Anggraeni Suseno, A.Md.Pnl.

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendry Arnaldy Langsa, SS

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Hendry Arnaldy Langsa, SS
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197702202009011005

Pihak Pertama,

Jihan Eka Anggraeni Suseno, A.Md.Pnl.
Pengatur (II/c)
NIP. 200008252022012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Laporan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2
		Jumlah laporan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan	1

Bontang, Januari 2025

Pihak Kedua,



Hendry Arnaldy Langsa, SS
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197702202009011005

Pihak Pertama,



Jihan Eka Anggraeni Suseno, A.Md.Pnl.
Pengatur (II/c)
NIP. 200008252022012005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
 2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
 3. Fungsi :
1. Membantu Menyiapkan Bahan Rencana Kerja Subbid P2
 2. Membantu Melaksanakan Analisis Data Berbasis Sistem Informasi
 3. Membantu Penyusunan Proyeksi Pendapatan Daerah
 4. Membantu Pengelolaan Data Potensi Pajak Daerah
 5. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Atasan

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah dan pengembangan pajak daerah Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah bahan penyusunan dokumen per objek pajak Jumlah bahan kegiatan dokumen kebijakan pajak	Realisasi Objek Pajak DPA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
 2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
 3. Fungsi :
1. Membantu Menyiapkan Bahan Rencana Kerja Subbid P2
 2. Membantu Melaksanakan Analisis Data Berbasis Sistem Informasi
 3. Membantu Penyusunan Proyeksi Pendapatan Daerah
 4. Membantu Pengelolaan Data Potensi Pajak Daerah
 5. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Atasan

No.	SASARAN KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah bahan kegiatan dokumen kebijakan pajak	DPA
		Jumlah laporan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah bahan laporan kegiatan TP2DD	ETPD



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karyanto, SE
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Darli, SH
Jabatan : Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Darli, SH
Penata Tingkat I
NIP 196803182001121001

Pihak Pertama,

Karyanto, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP 19710726 2010011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah data Berita Acara BPHTB yang Terealisasi	Jumlah data Berita Acara BPHTB -Jual Beli	Dokumen	12
		Jumlah data Berita Acara BPHTB - PTSL	Dokumen	12
		Jumlah Data berita acara BPHTB- Peningkatan	Dokumen	12
		Jumlah data Berita Acara BPHTB-Waris dan Hibah	Dokumen	12

Bontang, Januari 2022

Pihak Kedua,



Darli, SH
Penata Tingkat I

NIP 196803182001121001

Pihak Pertama,



Karyanto, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP 19710726 2010011001



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharto

Jabatan : Pengelola Data PBB - P2 dan BPHTB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Darli ,SH

Jabatan : Kesubbid Pelayanan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Darli ,SH
Penata Tingkat I
NIP. 196803182001121001

Pihak Pertama,

Suharto
Pengatur II/d
NIP. 198212 2010011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengelola Data PBB - P2 dan BPHTB
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

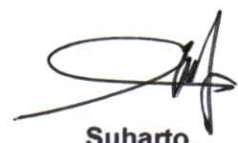
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Validasi Data dan Dokumen Wajib Pajak PBB dan BPHTB	Melakukan Urusan Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB	Laporan	12
		Melakukan Potensi Pendataan PBB dan BPHTB	Laporan	12
		Melakukan Pendataan dan Validasi Data Wajib Pajak	Laporan	12
		Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Penilaian Data Wajib Pajak	Laporan	12

Pihak Kedua,


Darli,SH
Penata Tingkat I
NIP. 196803182001121001

Bontang, 10 Januari 2025

Pihak Pertama,


Suharto.
Pengatur II/d
NIP. 1982122010 011002



MERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. MH. Thamrin RT 05 No. 15 Telpn (0548) 3555393, 3555444 Fax. (0548) 3555393
BONTANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prilyandono
Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Darli,SH
Jabatan : Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Darli,SH

Perata Tingkat I

NIP. 19680318 200112 1 001

Pihak Pertama,

Prilyandono

Pengatur IId

NIP. 19760422210011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengadministrasi Perkantoran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah data Berita Acara BPHTB yang Terealisasi	Jumlah Data Berita Acara BPHTB -Jual Beli	Dokumen	12
		Jumlah data Berita Acara BPHTB - PTSL	Dokumen	12
		Jumlah Data berita acara BPHTB- Peningkatan	Dokumen	12
		Jumlah data Berita Acara BPHTB-Waris dan Hibah	Dokumen	12

Bontang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


Darli,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680318 200112 1 001

Pihak Pertama,


Prilyandono
Pengatur II d
NIP. 19760422210011002



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masyruddin
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Darli,SH
Jabatan : Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Darli, SH
Penata Tingkat I
NIP 196803182001121001

Pihak Pertama,

Masyruddin
Penata Muda Tingkat I
NIP 196808012002121007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah data Berita Acara BPHTB yang Terealisasi	Jumlah Data Berita Acara BPHTB -Jual Beli	Dokumen	12
		Jumlah data Berita Acara BPHTB - PTSL	Dokumen	12
		Jumlah Data berita acara BPHTB- Peningkatan	Dokumen	12
		Jumlah data Berita Acara BPHTB-Waris dan Hibah	Dokumen	12

Bontang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,



Darli, SH
Penata Tingkat I
NIP 196803182001121001

Pihak Pertama,



Masyruddin
Penata Muda Tingkat I
NIP 196808012002121007



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usman ,SE
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Darli,SH
Jabatan : Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

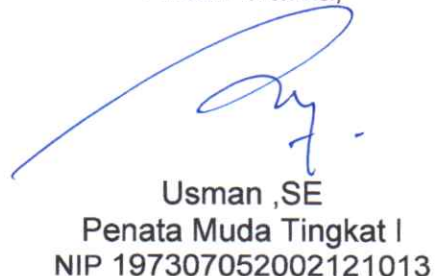
Bontang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,



Darli, SH
Penata Tingkat I
NIP 196803182001121001

Pihak Pertama,



Usman ,SE
Penata Muda Tingkat I
NIP 197307052002121013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah data Berita Acara BPHTB yang Terealisasi	Jumlah Data Berita Acara BPHTB -Jual Beli	Dokumen	12
		Jumlah data Berita Acara BPHTB - PTSL	Dokumen	12
		Jumlah Data berita acara BPHTB- Peningkatan	Dokumen	12
		Jumlah data Berita Acara BPHTB-Waris dan Hibah	Dokumen	12

Bontang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


Darli, SH
Penata Tingkat I
NIP 196803182001121001

Pihak Pertama,


Usman, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP 197307052002121013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
2. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi Menelaah, Memproses, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Terkait Pembuatan Berita Acara BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
3. Fungsi :
 1. Menelaah data yang di ajukan
 2. Meneliti Berkas Persyaratan BPHTB
 3. Menganalisa Jumlah Data Berita Acara BPHTB
 4. Melaksanakan Tugas yang diberikan atasan

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah data Berita Acara BPHTB yang terealisasi	Jumlah data Berita Acara BPHTB-Jual Beli	- Aplikasi BPHTB - SPPDT PBB
		Jumlah data Berita Acara BPHTB- PTSL	- Berkas dari Pelayanan - SPPDT PBB
		Jumlah data Berita Acara BPHTB- Peningkatan	- Berkas Dari Pelayanan - SPPDT PBB
		Jumlah data Berita Acara BPHTB- waris dan Hibah	- Aplikasi BPHTB - Surat Waris/Hibah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Data PBB - P2 dan BPHTB
2. Tugas : Melaksanakan urusan pendaftaran dan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah
3. Fungsi :
 1. Pelaksanaan urusan pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB
 2. Melakukan potensi pendataan PBB dan BPHTB
 3. Membantu melaksanakan pendataan dan validasi data wajib pajak PBB dan BPHTB
 4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan penilaian data wajib pajak PBB dan BPHTB
 5. Pelaksanaan fungsi lain terkait tugas dan fungsi Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB

No.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Validasi Data dan Dokumen Wajib Pajak PBB dan BPHTB	Melakukan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Melakukan Validasi PBB dan BPHTB Melakukan Potensi Pendataan PBB dan BPHTB Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penilaian Data Wajib Pajak	Jumlah bahan pendataan objek pajak PBB dan BPHTB Jumlah bahan pendataan dan pemutakhiran objek pajak PBB dan BPHTB Jumlah bahan pendataan objek pajak PBB dan BPHTB Jumlah bahan monitoring dan pelaksanaan kegiatan	PBB dan BPHTB PBB dan BPHTB PBB dan BPHTB PBB dan BPHTB

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**
2. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi Menelaah, Memproses, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Terkait Pembuatan Bea Acara BPHTB (Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan)
3. Fungsi :
 1. Menelaah data yang di ajukan
 2. Meneliti Berkas Persyaratan BPHTB
 3. Menganalisa Jumlah Data Berita Acara BPHTB
 4. Melaksanakan Tugas yang diberikan atasan

No.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	
1.	Jumlah data Berita Acara BPHTB yang terealisasi	Jumlah data Berita Acara BPHTB-Jual Beli	- Aplikasi BPHTB - SPPDT PBB
		Jumlah data Berita Acara BPHTB- PTSL	- Berkas dari Pelayanan - SPPDT PBB
		Jumlah data Berita Acara BPHTB- Peningkatan	- Berkas Dari Pelayanan - SPPDT PBB
		Jumlah data Berita Acara BPHTB- waris dan Hibah	- Aplikasi BPHTB - Surat Waris/Hibah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
2. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi Menelaah, Memproses, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Terkait Pembuatan Berita Acara BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
3. Fungsi :
 1. Menelaah data yang di ajukan
 2. Meneliti Berkas Persyaratan BPHTB
 3. Menganalisa Jumlah Data Berita Acara BPHTB
 4. Melaksanakan Tugas yang diberikan atasan

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah data Berita Acara BPHTB yang terealisasi	Jumlah data Berita Acara BPHTB-Jual Beli Jumlah data Berita Acara BPHTB- PTSL Jumlah data Berita Acara BPHTB- Peningkatan Jumlah data Berita Acara BPHTB- waris dan Hibah	- Aplikasi BPHTB - SPPDT PBB - Berkas dari Pelayanan SPPDT PBB - Berkas Dari Pelayanan SPPDT PBB - Aplikasi BPHTB - Surat Waris/Hibah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
2. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi Menelaah, Memproses, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Terkait Pembuatan Berita Acara BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
3. Fungsi :
 1. Menelaah data yang di ajukan
 2. Meneliti Berkas Persyaratan BPHTB
 3. Menganalisa Jumlah Data Berita Acara BPHTB
 4. Melaksanakan Tugas yang diberikan atasan

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah data Berita Acara BPHTB yang terealisasi	<p>Jumlah data Berita Acara BPHTB-Jual Beli</p> <p>Jumlah data Berita Acara BPHTB- PTSL</p> <p>Jumlah data Berita Acara BPHTB- Peningkatan</p> <p>Jumlah data Berita Acara BPHTB- waris dan Hibah</p>	<p>- Aplikasi BPHTB - SPPDT PBB</p> <p>- Berkas dari Pelayanan - SPPDT PBB</p> <p>- Berkas Dari Pelayanan - SPPDT PBB</p> <p>- Aplikasi BPHTB - Surat Waris/Hibah</p>



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardiyansyah, SE
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nur Alam, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Nur Alam, SE
NIP 197501182007011017

PIHAK PERTAMA

Ardiyansyah, SE
NIP 197412122007011018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tercapainya laporan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah	Terpenuhinya laporan penagihan piutang pajak bumi & bangunan	Laporan	12
2.	Tercapainya Laporan Hasil Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terpenuhinya laporan sub kegiatan penagihan pajak daerah & sub kegiatan pendendalian, pemeriksaan dan pengawasan	Dokumen	2

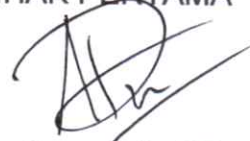
PIHAK KEDUA



Nur Alam, SE
NIP 197501182007011017

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



Ardiyansyah, SE
NIP 197412122007011018



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Nur Akhiyar
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nur Alam, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Nur Alam, SE
NIP 197501182007011017

PIHAK PERTAMA

M Nur Akhiyar
NIP 198006092010011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tercapainya laporan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah	Terpenuhinya penagihan PBJT Tenaga Listrik	Dokumen	12
		Terpenuhinya penagihan Pajak Air Tanah (PAT)	Dokumen	12

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



M Nur Akhiyar
NIP 198006092010011003

PIHAK KEDUA



Nur Alam, SE
NIP 197501182007011017



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Izhar
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suparyanto, SH
Jabatan : Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Suparyanto, SH
NIP 197502172001121003

PIHAK PERTAMA

Ali Izhar
NIP 196807122002121007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Jumlah laporan evaluasi pelayanan pajak Daerah.	Terpenuhinya laporan evaluasi Pemungutan Pajak Daerah	Laporan	12

Bontang, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA



Suparyanto, SH
NIP 197502172001121003

PIHAK PERTAMA



Ali Izhar
NIP 196807122002121007



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Setianawati, A.Md
Jabatan : Pengolah Data Dan Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nur Alam, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bontang, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

Dewi Setianawati, A.Md
NIP 19940901 201903 2 024

Pihak Kedua,

Nur Alam, SE
NIP 197501182007011017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Jumlah laporan penagihan pajak daerah untuk jenis pajak Reklame dan PBJT Jasa Perhotelan dan Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.	Jumlah laporan penagihan pajak daerah untuk jenis pajak Reklame dan PBJT Jasa Perhotelan	Laporan	12
		Jumlah Dokumen Pemeriksaan Pajak Daerah	Laporan	12

Bontang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



Nur Alam, SE
NIP 197501182007011017

Pihak Pertama,



Dewi Setianawati, A.Md
NIP 19940901 201903 2 024



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Afandi, A.Md.A.Pj.
Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nur Alam, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bontang, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Ahmad Afandi, A.Md.A.Pj.
NIP 199912292022011008

PIHAK KEDUA

Nur Alam, SE
NIP 197501182007011017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Jumlah laporan penagihan pajak daerah untuk jenis pajak PBJT Jasa Makanan dan/Minuman dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, dan Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Penagihan pajak daerah untuk jenis pajak PBJT Jasa Makanan dan/Minuman dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.	Laporan	12
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	Laporan	12

PIHAK KEDUA



Nur Alam, SE
NIP 197501182007011017

Bontang, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



Ahmad Afandi, A.Md.A.Pj.
NIP 199912292022011008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan yang meliputi menyiapkan, mengelola data, merekap & membuat laporan Kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Fungsi :
 1. Mengelola data dan membuat laporan Penagihan Piutang PBB-P2
 2. Menyapkan dan membuat laporan sub kegiatan Bidang Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
 3. Mengelola data & merekap pembatalan NOP PBB berdasarkan Kelurahan & Katagori
 4. Mengelola data & merekap data Kitiran PBB dan SPJ
 5. Menyiapkan Data DHKP PBB-P2 melalui aplikasi SISMIOP

SASARAN/KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
1. Tercapainya laporan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah	Mengelola data & membuat laporan Piutang PBB-P2	<p><i>Proses pengelolaan data piutang PBB-P2 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompilasi Data • Mengumpulkan data dari sistem informasi pajak daerah (SISMIOP), Excel • Validasi Data • Memeriksa kesesuaian antara jumlah piutang dengan pembayaran (catatan pembayaran SISMIOP) • Kategorisasi Data • Memisahkan piutang berdasarkan tahun pajak, wilayah (desa/kecamatan), dan status pembayaran. • Surat Tagihan Pajak Daerah • Melakukan penyampaian data piutang ditagihkan <p>Formulasi :</p> <p><i>Saldo akhir = (piutang + SPPT) – (realisasi + penghapusan)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PMK No. 85 Tahun 2024 • PMK No. 07 Tahun 2025 • Perwali No. 32 Tahun 2024 • Aplikasi SISMIOP • DHKP • Penghapusan Piutang

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
2. Tercapainya Laporan Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Menyiapkan & membuat laporan sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah & Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<p>1) Penagihan Pajak Daerah</p> <p>a. Total Tunggalan Pajak</p> <p>b. Persentase Penagihan Pajak Berhasil</p> <p>c. Rasio Surat Tagihan/Teguran</p> <p>d. Efisiensi Penagihan Pajak</p> <p>Formulasi Penagihan Pajak Daerah:</p> $\text{Presentase Penagihan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Pajak Yg Berhasil ditagih}}{\text{Total Tunggalan Pajak}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • $\geq 80\%$ → Penagihan efektif • $50\% - 79\%$ → Penagihan cukup efektif • $< 50\%$ → Penagihan kurang efektif <p>2) Komponen dalam Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah:</p> <p>a) Pengendalian</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Efektivitas Penerimaan Pajak ❖ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ❖ Rasio Tunggalan Pajak <p>b) Pemeriksaan Pajak Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Pemeriksaan Wajib Pajak • Rasio Temuan Ketidaksesuaian • Potensi Pajak Tambahan dari Pemeriksaan <p>c) Pengawasan Pajak Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Efektivitas Penagihan Pajak ✓ Rasio Surat Teguran dan Surat Paksa ✓ Efisiensi Pengawasan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • PMK No. 85 Tahun 2024 • PMK No. 07 Tahun 2025 • Perwali No. 32 Tahun 2024 • SIPD RI • DPA • SISMIOP • Rekapitan <ul style="list-style-type: none"> • PMK No. 85 Tahun 2024 • PMK No. 07 Tahun 2025 • Perwali No. 32 Tahun 2024 • SIPD RI • DPA • SISMIOP • Rekapitan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Umum
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan yang meliputi menyiapkan, penyampaian dan penagihan pajak daerah Kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Fungsi :
 1. Menyiapkan data PBJT Tenaga Listrik
 2. Menyiapkan data Pajak Air Tanah
 3. Melaksanakan penyampaian & penagihan PBJT Tenaga Listrik
 4. Melaksanakan penyampaian & penagihan Pajak Air Tanah
 5. Melaksanakan penagihan pajak daerah lain.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tercapainya laporan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah	Terpenuhinya penagihan PBJT Tenaga Listrik Terpenuhinya penagihan Pajak Air Tanah (PAT)	$PBJT = \text{Tarif } PBJT \times \text{DPP}$ <i>Penjelasan:</i> <i>Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu dikali Dasar Pengenaan Pajak sama dengan hasil pajak yang dibayarkan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Data Wajib Pajak • Aplikasi SIMPATDA • SKPD & Nota Perhitungan
	NPAT = Volume Air yang Diambil x Harga Dasar Air $PAT = \text{Tarif Pajak} \times \text{NPAT}$ <i>Penjelasan:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Volume Air yang Diambil: Dalam meter kubik (m^3), berdasarkan hasil pengukuran meter air atau perhitungan tertentu dikali Harga Dasar Air: Ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan zona atau klasifikasi air tanah sama dengan hasil NPAT • Tarif pajak dikali hasil NPAT sama dengan hasil PAT, pajak yang dibayarkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Wajib Pajak • Aplikasi SIMPATDA • SKPD & Nota Perhitungan 	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **Jabatan** : Pengadministrasi Umum
2. **Tugas** : Melaksanakan kegiatan yang meliputi menyiapkan, penyampaian dan penagihan pajak daerah Kegiatan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah
3. **Fungsi** :
 1. Menyiapkan data evaluasi pemungutan pajak daerah
 2. Melaksanakan penyampaian & penagihan pajak daerah

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jumlah laporan evaluasi pelayanan pajak Daerah.	Terpenuhinya laporan evaluasi Pemungutan Pajak Daerah	<p>Laporan evaluasi pemungutan pajak daerah :</p> <p>untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bada Pendapatan Daerah. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa target penerimaan pajak tercapai dan sistem pemungutan berjalan optimal yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Pemungutan Pajak 2. Efisiensi Pemungutan Pajak 3. Pertumbuhan Penerimaan Pajak 4. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 5. Tingkat Tunggakan Pajak <p><i>Formula:</i></p> $\text{Efektivitas Penagihan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Pajak berhasil ditagih}}{\text{Total Tunggakan Pajak}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jika $\geq 80\%$, berarti penagihan berjalan dengan baik. • Jika $< 50\%$, perlu strategi peningkatan penagihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Penerimaan • Target Penerimaan • WP yang bayar • WP Tendaftar • Tunggakan WP • Jumlah WP ditagihkan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengolah Data Dan Informasi
2. Tugas : Melaksanakan urusan Penagihan pajak daerah untuk jenis pajak Reklame dan PBJT Jasa Perhotelan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Fungsi :
 1. Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam rangka Uji Kepatuhan Pajak Daerah
 2. Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam rangka menindaklanjuti Keberatan dari wajib pajak daerah
 3. Melakukan Penagihan Pajak Daerah untuk jenis Pajak PBJT Jasa Perhotelan dan Pajak Reklame
 4. Membuat Laporan Penagihan Pajak Daerah untuk jenis Pajak PBJT Jasa Perhotelan dan Pajak Reklame
 5. Pelaksanaan Fungsi lain terkait tugas dan fungsi Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

No.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Proses Hasil Penagihan Pajak Daerah dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang telah terbayar Jumlah STPD yang telah disampaikan kepada wajib pajak daerah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Laporan Daftar Tunggakan. SKPD, Laporan Daftar Tunggakan. SPTPD SKPD Surat keberatan atas pajak daerah Surat perintah pemeriksaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penata Layanan Operasional
2. Tugas : Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Melaksanakan Urusan Penagihan Pajak Daerah untuk jenis Pajak PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Fungsi :
 1. Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam rangka Uji Kepatuhan Pajak Daerah
 2. Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam rangka menindaklanjuti Keberatan dari wajib pajak daerah
 3. Melakukan Penagihan Pajak Daerah untuk jenis Pajak PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan
 4. Membuat Laporan Penagihan pajak daerah untuk jenis Pajak PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dan laporan Pemeriksaan Pajak Daerah
 5. Pelaksanaan Fungsi lain terkait tugas dan fungsi Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah.

NO.	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Proses Hasil Penagihan Pajak Daerah dan Pemeriksaan Pajak Daerah	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</p> <p>Jumlah Pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah</p>	<p>Jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang telah terbayar</p> <p>Jumlah STPD yang telah disampaikan kepada wajib pajak daerah</p> <p>Jumlah Laporan Wajib Pajak Daerah</p>	<p>Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Laporan Daftar Tunggalan</p> <p>SKPD, Laporan Daftar Tunggalan.</p> <p>Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Laporan Buku Kendali, Kartu Data.</p>